

BAB I

PENDAHULUAN

Seperti yang pada umumnya diketahui, Inggris sudah sejak lama menjadi salah satu negara yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan bahasan dalam karya-karya ilmiah. Selain peran aktifnya dalam berbagai isu internasional, Inggris juga nyatanya memiliki sistem politik dan ekonomi yang dapat dikatakan unik sehingga hal tersebut mempengaruhi sikapnya dalam mengeluarkan kebijakannya terhadap negara-negara lain. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk menjadikan Inggris sebagai subjek dalam karya tulis ini guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai salah satu kebijakan Inggris yang memang dapat dikatakan menarik untuk diteliti.

A. Latar Belakang Masalah

Inggris adalah salah satu negara Eropa yang memiliki kapasitas ekonomi dan pengaruh politik cukup kuat di dunia. Sebagai negara maju, Inggris memiliki posisi dan peran penting di beberapa isu yang terjadi di level internasional, salah satunya dalam bidang ekonomi-politik. Bersama Amerika Serikat, Inggris dikenal sebagai negara inisiator yang membentuk sistem Bretton Woods pada

tahun 1944. Keterlibatan Inggris di dalam perjanjian yang menjadi cikal bakal lahirnya institusi-institusi ekonomi dan keuangan global tersebut secara tidak langsung telah membentuk opini dunia internasional dalam memandang Inggris sebagai salah satu hegemoni global.

Sebagai salah satu negara yang terlibat dalam proses pembentukan sistem Bretton Woods, Inggris tentunya menjadi salah satu pihak utama dan terkuat di dalam struktur keorganisasian institusi-institusi internasional yang menjadi produk Bretton Woods, seperti misalnya di dalam International Monetary Fund (IMF) dan juga World Bank (Bank Dunia). Sampai saat ini Inggris masih menjadi salah satu pemegang vote paling tinggi di dalam tubuh institusi IMF dan Bank Dunia sehingga posisi dan perannya di dalam kedua institusi tersebut dapat dikatakan sangatlah penting. Melalui perannya dalam melahirkan institusi-institusi tersebut, dapat dilihat bahwa secara tidak langsung Inggris memang berperan penting dalam penguatan sistem multilateral yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat internasional guna menyelesaikan permasalahan global yang dihadapi bersama.

Terkait dengan lahirnya institusi-institusi global setelah sistem Bretton Woods lahir, seperti halnya IMF dan Bank Dunia, beberapa institusi serupa lainnya pun kemudian mulai bermunculan, seperti misalnya Asian Development Bank (ADB), International Investment Bank (IIB) dan lain sebagainya. Kemunculan institusi-institusi internasional tersebut dapat dikatakan sebagai

bentuk respon masyarakat internasional yang berusaha mendorong terciptanya sistem multilateral yang semakin kuat. Oleh karena itu, menyusul dibentuknya beberapa institusi-institusi tersebut, sebuah institusi baru lain yang disebut Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pun kemudian muncul. Institusi berbentuk bank pembangunan multilateral itu pertama kali diajukan pembentukannya oleh pemerintah Tiongkok pada bulan Oktober 2013. Institusi keuangan yang diinisiasi oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping, ini memiliki misi untuk mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur di kawasan Asia yang lebih cepat sehingga nantinya akan memudahkan negara-negara lain di luar Asia untuk dapat memaksimalkan hubungan kerjasama dengan negara-negara Asia dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Meskipun fokusnya adalah untuk membantu pembangunan di Asia, namun AIIB memiliki sifat keanggotaan yang inklusif, artinya negara-negara di luar Asia juga diperkenankan untuk bergabung ke dalam institusi tersebut. Hal ini tentunya menjadi salah satu hal yang menarik perhatian negara-negara lain di luar kawasan Asia. Sampai sejauh ini pun, institusi yang menargetkan jumlah uang 100 Miliar Dollar AS sebagai modal awal pembentukannya ini sudah didukung oleh 57 negara dari berbagai penjuru dunia, termasuk sebagian besar dari kawasan di luar Asia.

Karena sifat keanggotaannya yang inklusif, negara-negara di luar kawasan Asia tentunya dapat mendaftar sebagai anggota AIIB. Pada tanggal 12

Maret 2015, menteri Keuangan Inggris, George Osborne, menyatakan bahwa Inggris akan mendaftarkan diri untuk menjadi anggota AIIB¹. Pada saat itu Inggris sendiri merupakan negara Barat pertama yang memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai inisiator sekaligus anggota institusi internasional ini. Keputusan tersebut tentunya menjadi pembicaraan hangat khususnya di kalangan negara-negara Barat mengingat Inggris adalah salah satu aktor yang berpengaruh dalam pembentukan institusi-institusi ekonomi dan keuangan global saat ini. Berbagai respon, baik positif maupun negatif pun bermunculan terkait kebijakan Inggris tersebut. Beberapa negara Barat lain seperti Austria, New Zealand, Jerman dan Perancis muncul sebagai pihak yang menyambut positif kebijakan tersebut dan berencana untuk kemudian bergabung dengan AIIB. Berbeda dengan respon Amerika Serikat, sebagai negara yang juga beraliansi dengan negara-negara pemberi respon positif justru muncul sebagai negara yang sedikit menentang pendirian AIIB dan kebijakan Inggris untuk bergabung dengan institusi yang diinisiasi oleh Tiongkok ini.

Seperti yang pada umumnya diketahui, Inggris juga merupakan sekutu paling dekat Amerika Serikat. Kedua negara sudah menjalin hubungan baik dalam kurun waktu yang lama sehingga keduanya juga memahami kepentingan nasional satu sama lain. Namun berbeda dengan hal yang satu ini, Amerika

¹ UK Announces Plans to Join Asian Infrastructure Investment Bank. (2015, Maret 12). Dipetik Juli 18, 2015, dari GOV.UK: <http://www.gov.uk/government/news/uk-announces-plans-to-join-asian-infrastructure-investment-bank>

Serikat memberikan respon yang kurang baik dalam menyambut kebijakan Inggris untuk bergabung ke dalam AIIB. Amerika Serikat sebagai penggagas utama perjanjian Bretton Woods sekaligus pendonor modal tertinggi di IMF dan Bank Dunia tentunya merasa keberatan dengan pendirian keputusan sekutu terdekatnya tersebut sehingga pada akhirnya Amerika Serikat memberikan sambutan kurang baik terkait bergabungnya Inggris ke AIIB.

Respon Amerika terkait rencana pemerintah Inggris untuk bergabung dengan AIIB pada kenyataannya tidak mengurungkan niat Inggris untuk tetap masuk ke dalam bank pembangunan multilateral buatan Tiongkok tersebut. Pada tanggal 12 Maret 2015, Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, mewakili Perdana Menteri David Cameron memutuskan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota baru.² Dengan demikian, pada akhirnya secara resmi Inggris bergabung dengan AIIB pada tanggal 18 Maret 2015 setelah permintaanya untuk bergabung diterima oleh Tiongkok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta pemaparan permasalahan di atas, maka untuk mempermudah proses pemecahan masalah dan sebagai panduan

² AIIB Akan Saingin Bank Dunia yang Selama Ini Rugikan Negara Miskin: Inggris Gabung Tiongkok Bangun Bank Infrastruktur. (2015, Maret 16). Koran Jakarta: www.koran-jakarta.com/?29295-inggris%20gabung%20tiongkok%20bank%20infrastruktur

dalam pembahasan selanjutnya, dapatlah ditarik pokok permasalahan seperti berikut ini:

”Mengapa Inggris bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)?”

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Dalam pemahaman ilmu hubungan internasional, konsep kepentingan nasional dikenal sebagai salah satu konsep paling populer dalam kajian isu-isu internasional, yang sering kali digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, konsep kepentingan nasional adalah:

“... the fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements of constitute the state most vital needs. These include self-preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being.”³

³ Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, USA. 1969. Hlm. 128

Menurut pengertian di atas kepentingan nasional adalah tujuan dasar atau determinan penting yang mendasari pengambilan keputusan suatu negara dalam membuat kebijakan politik luar negerinya, sehingga kepentingan suatu negara secara umum dapat dipahami juga sebagai elemen-elemen yang membentuk keperluan dan juga kebutuhan vital sebuah negara. Melihat pernyataan tersebut, sangat jelas terlihat bahwa kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara sebagai suatu hal yang dijadikan landasan fundamental bagi negara tersebut untuk mengeluarkan kebijakan atau melakukan suatu tindakan tertentu terhadap negara lainnya.

Kepentingan nasional sering juga dipahami sebagai ‘tujuan nasional’, dimana ketika suatu negara melakukan suatu tindakan, biasanya hal tersebut akan dilakukan dengan berdasar pada tujuan negara yang hendak diraih. Dalam konteks tujuan nasional ini, tujuan yang dimiliki oleh semua negara dan bangsa dapat dikatakan relatif sama, yaitu untuk mencapai keamanan (*security*) serta kesejahteraan (*prosperity*) negaranya. Lebih spesifiknya lagi, menurut Plano dan Olton, kepentingan nasional atau tujuan nasional biasanya akan meliputi beberapa unsur khusus, seperti kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemandirian, keutuhan wilayah negara, keamanan militer serta kesejahteraan ekonomi.

Menurut Mohtar Mas’oed, konsep kepentingan nasional dipahami sebagai: “gambaran bagi para pembuat keputusan politik luar negeri dalam

berfikir dan bertindak berdasar pertimbangan apakah pilihan-pilihan yang diambil itu menguntungkan atau merugikan negaranya.”⁴

Paul Seabury mendefenisikan kepentingan nasional melalui dua sifat berbeda, yakni melalui sifat yang normatif dan deskriptif. Secara deskriptif kepentingan nasional diartikan sebagai sebuah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah dan perjuangan yang gigih. Sedangkan secara normatif kepentingan nasional adalah serangkaian cita-cita atau tujuan ideal suatu bangsa yang berusaha diwujudkan dengan cara menjalin hubungan atau interaksi dengan negara lain.⁵

Dari kutipan Mohtar Mas’oed dan Paul Seabury di atas, kepentingan nasional dipahami sebagai sebuah konsep yang sering kali dikaitkan dengan politik atau kebijakan luar negeri suatu negara. Hal tersebut dikarenakan kepentingan nasional diset sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan tertentu. Dengan demikian, singkatnya, konsep kepentingan nasional diartikan sebagai serangkaian tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara dengan memformulasikannya ke dalam serangkaian kebijakan luar negeri.

⁴ Mohtar Mas’oed, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*, Yogyakarta, 1988. Hlm. 136-137

⁵ K. J Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisa Edisi Keempat Jilid 1*, Penerbit Erlangga Jakarta, 1983. Hlm. 136-137

Mengenai rumusan masalah dalam karya tulis ini, konsep kepentingan nasional dapat digunakan untuk menganalisa tujuan atau kepentingan nasional yang melatarbelakangi kebijakan Inggris untuk bergabung dengan AIIB. Kebijakan tersebut diperikaran tidak serta-merta dikeluarkan hanya untuk mendukung Tiongkok dalam mendirikan AIIB atau untuk membantu pembangunan infrastruktur di kawasan Asia saja, dapat diprediksi bahwa ada satu hal lain yang kemudian melatarbelakangi sekaligus mendorong Inggris untuk harus bergabung dengan AIIB.

Seperti diketahui pada umumnya, Inggris adalah sebuah negara maju yang secara pengaruh politik, ekonomi dan militer dapat dikatakan memainkan peran penting dalam konteks kehidupan internasional. Terlepas dari majunya Inggris sebagai sebuah negara, tentunya Inggris tetap mengejar serangkaian tujuan yang kemudian dapat diraih salah satunya dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan luar negeri tertentu. Maka, dengan konsep kepentingan nasional ini, penulis juga akan mencoba untuk menganalisa kepentingan nasional yang hendak dicapai oleh Inggris berkaitan dengan keputusannya untuk bergabung ke dalam AIIB dari perspektif pembuat keputusan sebagai aktor yang sangat penting di dalamnya dengan menggunakan kerangka pemikiran tambahan, yaitu Model Aktor Rasional.

2. Model Aktor Rasional (*Rational Actor Model*)

Model Aktor Rasional pada umumnya digunakan untuk menganalisa dan memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara. Model ini sering kali dijadikan sebagai dasar untuk menyelidiki bahwa pelaku yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut adalah karakter rasional. Selain itu, model ini juga digunakan untuk melahirkan banyak asumsi atau pandangan yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan penjelasan yang paling baik dari tindakan atau kebijakan suatu negara. Setiap asumsi tersebut digunakan untuk menjelaskan suatu tindakan atau kebijakan, yaitu tindakan yang merefleksikan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Asumsi-asumsi dalam model ini mengungkapkan bahwa aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah negara itu sendiri karena tindakan politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara adalah perhitungan untung dan rugi dalam proses penyelesaian masalah-masalah tertentu.

Menurut Graham T. Allison model Aktor Rasional ini adalah salah satu model yang seringkali digunakan untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan luar negeri. Allison menambahkan bahwa model ini memandang politik luar negeri atau kebijakan luar negeri sebagai hasil dari tindakan-tindakan aktor rasional. Dalam merancang tindakan-tindakan tersebut, pembuat keputusan sebagai aktor penting di dalamnya akan dapat

berpikir rasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya.^{6 7} Pembuat keputusan tersebut akan berusaha keras untuk mengoptimalkan kemampuan dan tindakannya agar dapat mencapai tujuannya (kepentingan nasional). Tujuan yang dimaksud di sini adalah mengoptimalkan hasil yang akan didapat serta menekan segala kerugian yang akan muncul.

Selain itu, dalam bukunya yang berjudul *Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Mohtar Mas' oed memaparkan bahwa model aktor rasional memandang politik luar negeri sebagai:

“.....akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.”⁸

⁶ Graham T. Allison,. “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis.” *American Political Science Review* 63 : 3 Tahun 1969. Hlm. 689-718

⁷ Mar'atus Solikhah, *Kepentingan Cina Terhadap Program Nuklir Iran*, Skripsi HI UMY, 2012. Hlm. 11

⁸ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, PT. Pustaka LP3S Jakarta, 1990. Hlm. 234

Melalui penjelasan-penjelasan tentang model aktor rasional tersebut dapat dipahami bahwa pembuat keputusan luar negeri pada umumnya harus dapat mempertimbangkan segala keuntungan dan kerugian yang akan didapat sebagai hasil dari diberlakukannya keputusan tersebut. Oleh karena itu, sebelum memutuskan kebijakan luar negerinya, aktor (negara) tersebut akan harus menganalisa terlebih dahulu langkah-langkah khusus seperti misalnya mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi dan memprioritaskan tujuan yang hendak dicapai, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi jalan atau cara alternatif untuk mencapai tujuan, menganalisa jalan atau cara alternatif dengan pertimbangan untung dan rugi dari setiap alternatif dan probabilitas yang terkait dengan tujuan yang hendak dicapai, memilih alternatif yang dapat memaksimalkan peluang untuk memilih alternatif terbaik, membuat keputusan, dan yang terakhir memantau serta mengevaluasi hasil keputusan yang sudah dibuat.^{9 10}

Penulis memilih model aktor rasional sebagai salah satu kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk mempermudah analisa kasus karena dalam memutuskan untuk bergabung dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Pemerintah Inggris merupakan aktor individu tunggal yang diharuskan untuk berpikir serta bertindak cepat dalam memutuskan

⁹ Greg Cashman, *What Causes War? An Introduction to Theories of International Conflict*, New York, 1993.

¹⁰ Mar'atus Solikhah, *Kepentingan Cina Terhadap Program Nuklir Iran*, Yogyakarta, 2012. Hlm. 12

kebijakan luar negeri yang harus diambil untuk segera mengatasi permasalahan yang tengah terjadi demi mengamankan kepentingan nasional Inggris sendiri. Pembahasan masalah dengan melibatkan birokrasi politik maupun kelompok-kelompok kepentingan diprediksi akan memperlama durasi pengambilan keputusan dan implementasi tindakan. Hal tersebut mungkin saja akan menjadi berbeda jika situasi yang tengah terjadi bukanlah situasi yang mendesak. Melalui model aktor rasional ini, para pembuat keputusan, yakni Pemerintah Inggris, dianggap menjadi aktor rasional yang umumnya memang cenderung mempertimbangkan keputusannya secara rasional.

Terkait dengan rumusan masalah pada tulisan ini, model aktor rasional digunakan untuk menggambarkan sebesar apa dilemma pemerintah Inggris sebagai aktor utama pembuatan keputusan negara, dalam menentukan keputusannya untuk bergabung atau tidak bergabung dengan AIIB. Di satu sisi, David Cameron sebagai perdana menteri memiliki fokus untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang meningkat setiap tahunnya. Sesuai misi kampanyenya di Pemilu Mei 2015, Cameron memaparkan bahwa pemerintahannya akan bekerja sangat keras untuk mewujudkan perokonomian Inggris yang semakin baik. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan memaksimalkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain untuk kemudian mendorong pertumbuhan

ekonomi domestik. Terlebih lagi, apabila rencana Inggris untuk keluar dari Uni Eropa benar terjadi, Inggris akan semakin membutuhkan mitra kerjasama ekonomi lain mengingat selama ini kerjasama ekonomi Inggris banyak dilakukan dengan negara-negara anggota organisasi regional tersebut.¹¹ Dilihat dari sisi berbeda, seiring dengan prosesnya bergabung dengan AIIB, Inggris sebagai negara pembentuk Sistem Bretton Woods yang melahirkan IMF dan Bank Dunia juga mendapatkan respon kurang baik dari Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat sekaligus partnernya dalam mendirikan Sistem Bretton Woods tersebut.

Karena dua hal di atas, Inggris sempat berada di dalam posisi yang sulit untuk menentukan keputusannya, apakah harus bergabung dengan AIIB atau mengikuti Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang menolak untuk bergabung dengan institusi keuangan internasional besutan pemerintah Tiongkok tersebut. Namun pada akhirnya pemerintah Inggris di bawah David Cameron akhirnya tetap mengesampingkan saran serta reaksi dari Amerika dan tetap memutuskan untuk bergabung dengan AIIB.

Apabila terdapat dua opsi bagi pemerintah Inggris dalam menyikapi pembentukan AIIB, yakni opsi untuk bergabung dan untuk tidak bergabung. Maka sejak awal Inggris tentu harus dapat memetakan keuntungan serta

¹¹ The United Kingdom: Background and Relations with the United States, *Congress Research Service*, April 2015, hlm. 6

kerugian yang mungkin akan didapatnya sebagai konsekuensi dari realisasi masing-masing opsi. Dengan mengaplikasikan kerangka pemikiran Konsep Kepentingan Nasional dan Model Aktor Rasional dalam kasus bergabungnya Inggris ke dalam AIIB, maka dapat diketahui motivasinya melalui tabel untung-rugi seperti berikut ini:

Table 1: Untung Rugi Inggris sebagai Aktor Rasional terkait Kebijakannya Bergabung dengan AIIB

Indikator	Opsi			
	Bergabung dengan AIIB		Tidak bergabung dengan AIIB	
	<i>Keuntungan</i>	<i>Kerugian</i>	<i>Keuntungan</i>	<i>Kerugian</i>
<i>Mitra kerjasama (khususnya dalam bidang ekonomi)</i>	Memiliki kesempatan besar untuk menjalin dan memperkuat kerjasama bilateral dengan Tiongkok sebagai inisiator AIIB sekaligus negara yang memiliki potensi ekonomi yang kuat.	Tidak ada kerugian, karena mitra kerjasama yang didapat justru akan secara langsung menguntungkan perekonomian Inggris.	Tidak ada keuntungan bagi Inggris.	Kerugian besar akan dialami ketika rencananya keluarnya Inggris dari Uni Eropa terjadi, sehingga Inggris kehilangan mitra kerjasama ekonominya (yang mayoritasnya adalah negara-negara anggota UE) dan belum memiliki mitra kerjasama pengganti.
<i>Investasi dan perdagangan.</i>	Keuntungan besar, investasi Tiongkok di Inggris akan berkembang pesat, begitupun sebaliknya.	Tidak ada kerugian dalam bidang investasi dan perdagangan.	Tidak ada keuntungan yang diperoleh apabila tidak mengembangkan investasi dan perdagangan dengan Tiongkok.	Kerugian besar apabila Inggris tidak dapat mengembangkan kerjasama investasi dan perdagangannya Tiongkok, mengingat apabila Inggris benar keluar dari Uni Eropa maka hal tersebut akan mempengaruhi sektor perdagangan dan investasi negaranya.

Jadi operasionalisasi dari kedua kerangka pemikiran di atas pada akhirnya dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana Inggris sebagai aktor

rasional berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui pemberlakuan kebijakan untuk bergabung dengan AIIB dengan tetap mempertimbangkan aspek untung dan rugi. Dari tabel di atas sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa kebijakan Inggris untuk bergabung ke dalam AIIB nyatanya dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan kerugian yang mungkin muncul sebagai akibat dari implementasi kebijakan tersebut. Dari tabel tersebut juga dapat diprediksi bahwa kepentingan yang hendak dicapai oleh Inggris secara umum sangat berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan negaranya (*prosperity*), melihat keuntungan ekonomi yang akan muncul sebagai akibat dari bergabungnya negara tersebut ke dalam AIIB diprediksi akan dapat membantu proses pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian isu-isu ekonomi Inggris yang menjadi salah satu fokus pemerintahan David Cameron setelah terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Inggris pada bulan Mei 2015.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran serta analisis singkat yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: Inggris memutuskan untuk bergabung dengan AIIB karena dengan hal tersebut Inggris dapat meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok sebagai inisiator AIIB. Perluasan hubungan kerjasama ekonomi tersebut dapat diraih

salah satunya dengan cara meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi asing.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin melalui penulisan skripsi ini antara lain adalah:

1. Mendapatkan pemahaman yang lebih sistematis dan mendalam tentang konsistensi kebijakan Inggris untuk bergabung ke dalam AIIB serta mengetahui alasan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh Inggris melalui kebijakan tersebut.
2. Menambah referensi keilmuan penulis tentang ilmu hubungan internasional.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup waktu dan jangkauan penelitian yang menjadi objek penulisan, serta subjek penelitian itu sendiri guna memperjelas bahasan dari penulisan ini.

Adapun jangkauan waktu penelitian ini dibatasi selama tahun 2013-2015, dengan subjek utama Inggris sebagai aktor utama yang mengeluarkan kebijakan untuk bergabung ke dalam AIIB.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan informasi mengenai gambaran umum penulisan yang diperoleh dengan menggunakan teknik data sekunder. Teknik data sekunder adalah pengumpulan data melalui studi pustaka.

Adapun data yang diperoleh dari teknik sekunder adalah berupa buku, artikel-artikel ilmiah, surat kabar cetak dan elektronik, situs internet serta sumber-sumber yang valid dan relevan bagi penulis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat yang mutlak untuk memenuhi kaidah penulisan yang ilmiah. Oleh karena itu, baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara penulis menyajikan hasil penelitian tersebut. Adapun rencana sistematika penulisan yang terdapat dalam proposal ini adalah:

BAB I : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Kebijakan luar negeri Inggris dan keadaan politik serta ekonomi di dalam negeri yang menjadi bahan pertimbangan politik luar Negeri Inggris

Dalam bab ini akan diterangkan pembahasan mengenai karakter politik luar negeri Inggris sampai dengan kondisi politik dan ekononomi dalam negerinya.

BAB III : Pembentukan AIIB dan respon dunia internasional terhadap pembentukannya

Pada bab ini akan diterangkan bahasan penting mengenai pembentukan AIIB dan respon beberapa aktor penting di dalam dunia internasional terkait pembentukan institusi tersebut. Pada bab ini juga akan sedikit di singgung respon positif Inggris hingga pada akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam AIIB

BAB IV : Kepentingan yang ingin dicapai oleh Inggris di balik sikapnya yang ingin tetap bergabung dengan AIIB.

Bab ini akan membuktikan hipotesa penulis melalui pemaparan tujuan atau alasan yang melatarbelakangi kebijakan Inggris serta untuk bergabung ke dalam AIIB.

BAB V : Penutup dan Kesimpulan

Berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang telah disusun oleh penulis di dalam setiap bab karya tulis ini.